



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 7
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Rapat Dengar Pendapat / Ke-5
Dengan	: Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI dan Ketua Dewan Pengawas BPKH serta Kepala Badan Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 Maret 2018
Waktu	: Pukul 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: H. Iskan Qolba Lubis, M.A
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: 1. Renstra 2018-2022, 2. Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 dan 3. Penggunaan Nilai Manfaat Keuangan Haji Tahun 2018.
Hadir	: 1. orang dari 45 orang Anggota 2. Dirjen PHU Kemenag RI beserta jajarannya 3. Ketua Dewan Pengawas BPKH dan Kepala Badan Pelaksana BPKH

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen PHU Kemenag RI, Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana BPKH yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H.M. Ali Taher, S.H., M.Hum, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggara Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI, Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas **“Renstra 2018-2022, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 dan nilai Manfaat Keuangan Haji Tahun 2018”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menyetujui rencana strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018-2022 yang diajukan oleh BPKH untuk dijadikan kerangka acuan kebijakan dalam pengelolaan keuangan haji.
2. Komisi VIII DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan Haji Rp250.000.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dengan mempertimbangkan efisiensi, transparansi dan akuntabel.
3. Komisi VIII DPR RI menyetujui penggunaan sisa dana optimalisasi sampai dengan 31 Desember 2017, untuk mendukung pembiayaan operasional haji, paling sedikit untuk 2 (dua) kali masa operasional haji terhitung sejak tahun 1439H/2018M.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI dan BPKH melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat dicapai penghematan penggunaan *indirect cost* Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439H/2018M.
5. Komisi VIII DPR RI meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan target perolehan nilai manfaat keuangan haji dan dana alokasi umat untuk menyesuaikan meningkatnya biaya penyelenggaraan ibadah haji dan program kemaslahatan umat.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.40 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

H. ISKAN QOLBA LUBIS, MA